

Peran Pemerintah Daerah dalam Memajukan Pariwisata di Kecamatan Tondano Barat Kabupaten Minahasa

Devie S. R. Siwij^{a,1*}, Thelma Wawointana^{b,2}, Josua Silalahi^{c,3}, Herke F. V. Memah^{d,4}, Lidya Tengker^{e,5}

^{abcde} Universitas Negeri Manado, Tondano, Indonesia

^{1*} deviesiwij@unima.ac.id, ² thelmawawointana@unima.ac.id, ³ a085296698096@gmail.com, ⁴ h3rk30104@gmail.com, ⁵ lidyatengker@unima.ac.id

INFO ARTIKEL

ABSTRACT

Key word:
Role, Government,
Tourism, Minahasa
Regency

This research is based on the lack of government performance in developing tourism in Tondano Barat District. The main objective is to find out how far the performance or role is in developing the government and what are the obstacles for the government in carrying out its duties. By using a qualitative approach, the indicators that can be studied are performance, obstacles, and encouragement from natural resources and also encouragement from human resources in the surrounding environment in Tondano Barat District. This analysis uses descriptive qualitative. The results of this study obtained the results from direct interviews with five informants, namely, 3 tourists and 2 employees of the Minahasa Regency Tourism Office who considered that the government's performance had indeed decreased because the budget allocations they had were not directly derived from the APBD but had to do a test first in the province so as to cause delays performance in development and the lack of capable human resources in terms of tourism development in the Minahasa region. Thus it can be concluded that the government's performance has not gone well according to what is felt by the community and visitors as assessed from tourism infrastructure, promotion and marketing, tourism management, human resource development and tourism impacts

INTISARI

Kata kunci:
Peran, Pemerintah,
Pariwisata, Kabupaten
Minahasa

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurangnya kinerja pemerintah dalam mengembangkan pariwisata di Kecamatan Tondano Barat. Tujuan utamanya adalah untuk mengetahui sejauh mana kinerja atau peran pemerintah dalam mengembangkan dan apa saja yang menjadi hambatan pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, maka indikator yang dapat dikaji adalah kinerja, hambatan, dan dorongan dari sumber daya alam dan juga dorongan dari sumber daya manusia yang ada di lingkungan sekitar di Kecamatan Tondano Barat. Analisis ini menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini diperoleh hasil dari wawancara langsung dengan lima informan yaitu, 3 orang wisatawan dan 2 orang pegawai Dinas Pariwisata Kabupaten Minahasa yang menilai bahwa kinerja pemerintah memang mengalami penurunan karena alokasi anggaran yang mereka miliki tidak langsung berasal dari APBD melainkan harus melakukan uji coba terlebih dahulu di provinsi sehingga menyebabkan keterlambatan kinerja dalam pengembangan dan kurangnya sumber daya manusia yang mumpuni dalam hal pengembangan pariwisata di wilayah Minahasa. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kinerja pemerintah belum berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang dirasakan oleh masyarakat dan pengunjung yang dinilai

Diterima : 11 – Des – 23
Dipublish : 17 – Des – 23

dari sarana prasarana pariwisata, promosi dan pemasaran, pengelolaan pariwisata, pengembangan sumber daya manusia dan dampak pariwisata.

Copyright © 2023 (Devie Siwij). All Right Reserved

1. Pendahuluan

Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 mengenai pemerintah daerah ditentukan bahwa karena negara Indonesia itu adalah negara kesatuan maka Indonesia tidak akan mempunyai daerah di dalam wilayahnya yang berbentuk negara. Untuk wilayah Indonesia dibagi menjadi Provinsi dan dibagi lagi menjadi lebih kecil yaitu kabupaten atau kota. Daerah-daerah wilayah tersebut bersifat otonom, dengan daerah yang boleh mengurus rumah tangganya sendiri dan daerah administrasi yaitu daerah yang tidak boleh berdiri sendiri.

Pariwisata adalah perjalanan dari suatu tempat ke tempat lain, bersifat sementara dilakukan secara perorangan maupun kelompok, sebagai usaha untuk mencari keseimbangan dan keserasian dan kebahagiaan dengan lingkungan hidup dalam dimensi sosial, budaya juga alam dan ilmu [1]

Berdasarkan UU No. 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata memuat Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah daerah, sebagaimana wewenangnya yaitu: a. Menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional; b. Mengkoordinasikan pembangunan kepariwisataan lintas sektor dan lintas provinsi; c. Menyelenggarakan kerja sama internasional di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. Menetapkan daya tarik wisata nasional; e. Menetapkan destinasi pariwisata nasional; f. Menetapkan norma, standar, pedoman, prosedur, kriteria, dan sistem pengawasan dalam penyelenggaraan kepariwisataan; g. Mengembangkan kebijakan pengembangan sumber daya manusia di bidang kepariwisataan; h. Memelihara, mengembangkan dan melestarikan aset nasional yang menjadi daya Tarik wisata dan aset potensial yang belum tergalai; i. Melakukan dan memfasilitasi promosi pariwisata nasional; j. Memberikan kemudahan yang mendukung kunjungan wisatawan; k. Memberikan informasi dan/atau peringatan dini yang berhubungan dengan keamanan dan keselamatan wisatawan; l. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan potensi wisata yang dimiliki masyarakat; m. Mengawasi, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan kepariwisataan. Mengalokasikan anggaran kepariwisataan [2].

Memajukan sektor pariwisata merupakan tanggung jawab bersama baik pada tingkat pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Dengan itu sudah sewajarnya dalam hal ini pemerintah kabupaten Minahasa harus memajukan pariwisata yang ada di Kabupaten Minahasa terkhusus Kecamatan Tondano Barat yang akan

berdampak pada kesejahteraan dan perokonomian masyarakat sekitar daerah tempat wisata. Pariwisata yang di Kecamatan Tondano Barat harus menjadi salah satu fokus utama pemerintah kabupaten Minahasa dalam konteks pembangunan ataupun pengembangan jangka panjang sekaligus menjaga budaya dan sejarah yang ada di wilayah tersebut.

Proses pengembangan untuk memajukan pariwisata secara menyeluruh di Tondano Barat yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah bukan saja bertumpu pada pembangunan sarana dan prasarana tetapi pemasaran dan pengolahan tempat wisata juga sangat penting, serta menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memberikan pelayanan yang baik dan bersaing sesuai tuntutan zaman. Salah satu yang menjadi poin penting dalam memajukan pariwisata adalah memberikan fasilitas serta rasa aman kepada wisatawan yang datang ke tempat wisata adalah tugas pokok dari pemerintah daerah Kabupaten Minahasa terkhusus Dinas Pariwisata.

Pariwisata adalah kegiatan yang melibatkan masyarakat secara langsung, sehingga berdampak besar terhadap masyarakat setempat yang berada di daerah sekitar tempat wisata. Pembangunan sektor pariwisata ini berdampak baik untuk masyarakat maupun pemerintah serta daerah. Memajukan sektor ini sangat berdampak besar karena mendorong perekonomian lokal yang dirasakan langsung masyarakat seperti peluang berusaha [3].

Peranan pemerintah daerah dalam mengelola objek wisata budaya, alam dan sejarah memang dinilai masih tidak tertata, dikarenakan pelaksanaan yang terjadi dilapangan masih kurang dapat dilihat infrastruktur dan sarana-prasarana yang belum sepenuhnya mendukung. Salah satu kendala dalam menghadapi pengelolaan objek wisata yang ada di kecamatan Tondano Barat adalah pengelolaan kegiatan secara efektif dan efisien. Dalam pengelolaan wisata adalah tugas penting bagi pemerintah daerah Kabupaten Minahasa, dimana pemerintah berperan sebagai pembangun wisata serta menunjang dengan melakukan promosi dan beberapa kegiatan lainnya. Oleh karena itu sangat perlu pengelolaan yang tepat serta manajemen pengelolaan wisata untuk rencana pembangunan objek wisata.

Infrastruktur serta pengelolaan pariwisata adalah peranan penting dalam langkah memajukan pariwisata. Keberadaan infrastruktur yang memadai sangat dibutuhkan. Perawatan infrastruktur merupakan langkah penting dalam memajukan pariwisata dan memberikan keamanan dan kenyamanan kepada pengunjung. Begitu juga pengelolaan pariwisata yang baik dapat meningkatkan kunjungan kepada wisatawan asing

* Korespondensi Penulis; deviesiwij@unima.ac.id

serta wisatwan lokal untuk datang ke tempat wisata tersebut [4].

Pengembangan sebuah lokasi wisata yang tidak disertai dengan kemampuan dalam merencanakan, mengelola serta mengoperasikan dengan baik akan sulit bagi pihak pengelola untuk mencapai tujuan dari didirikannya wisata tersebut, seperti kurangnya kunjungan wisatwan karena objek wisata yang kurang menarik. Oleh karena itu peranan pemerintah dalam memajukan pariwisata sangatlah penting dan membutuhkan konsep yang sudah matang agar selalu diminati oleh wisatwan.

Dari hasil penelitian penulis dalam hal pengelolaan pariwisata di Kecamatan Tondano Barat masih kurang relevan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya situs daerah dan tempat wisata yang kurang layak sehingga masyarakat tidak tertarik untuk berkunjung di tempat wisata di daerah Tondano Barat. Pemerintah dan masyarakat harus bekerjasama untuk membangun pariwisata yang ada di Tondano Barat, selain menjadi penunjang pendapatan daerah, pariwisata juga dapat meningkatkan pengetahuan tentang budaya Minahasa. Karena banyaknya pariwisata yang kurang diperhatikan oleh pemerintah daerah

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ Peran Pemerintah Daerah Kecamatan Dalam Memajukan Pariwisata Di Kecamatan Tondano Barat Kabupaten Minahasa”

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif karena dengan penelitian kualitatif lebih menekankan pada proses pencarian makna, pengungkapan makna, dibalik yang terjadi di lapangan [5] serta hal yang menyangkut penelitian mengenai peran pemerintah dalam memajukan pariwisata yang di kecamatan Tondano Barat.

Sumber data utama penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan, seperti dokumen dan lain lain [6]. Penelitian ini menggunakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu dimana informansi atau data yang dikumpulkan dipilih sesuai anggapan bahwa dipercaya sebagai sumber utama.

Penelitian kualitatif selain dapat mengungkapkan terjadi-kejadian yang nyata tetapi di harapkan dapat memunculkan nilai-nilai yang tersembunyi. Suatu jenis penelitian dengan memperhatikan kesesuaian dengan objek studi atau dengan penelitian yang sangat diperlukan jenis penelitian yang sesuai dengan pokok permasalahan dan tujuan penelitian dengan maksud agar memperoleh data yang relevan dengan permasalahan penelitian [7].

Dalam penelitian kualitatif menggunakan metode pendekatan deksriptif, dimana pendekatan deksriptif merupakan suatu metode dalam meneliti

status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem, pemikiran atau data kelas kejadian pada sekarang. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti itu sendiri dan teknik pengumpulan data bergerak dari lapangan empiris dalam upaya membangun teori dari data dengan cara memasuki lokasi lapangan dan ketika berada di lokasi lapangan serta pengumpulan data[8] .

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Peran Pemerintah dalam Memajukan Pariwisata

Peran pemerintah dalam memajukan pariwisata yang mengalami kemunduran dalam perkembangan pariwisata yang ada di Tondano Barat.

Dalam hal peran pemerintah dalam memajukan pariwisata yang di Kecamatan Tondano Barat bisa dinilai langsung masyarakat ataupun dilihat dari kondisi bangunan wisata tersebut. Dalam hal menarik wisatawan sudah menjadi tugas pemerintah dalam melakukan pemasaran wisata kepada para wisatwan.

Dengan demikian peran pemerintah Pariwisata Kabupaten Minahasa terkhusus di daerah Kecamatan Tondano Barat dalam memajukan pariwisata sangat berperan penting

1. Infrastruktur Wisata

Menurut (Hudson, 1997), Infrastruktur adalah sebuah sistem fasilitas publik yang bersifat fundamental di tujukan kepada masyarakat ramai untuk melayani dan memudahkan masyarakat. Ada tiga jenis infrastruktur, yaitu Infrastrukture Fisik yang wujudnya nyata (Jalan dan Bagunan Gedung), Infrastruktur non-fisik (Pasokan air dan listrik) dan Infrastruktur lunak (Etika kerja dan Pelayanan publik) [9].

Infrastruktur wisata adalah kumpulan fasilitas fisik dan sarana yang telah disediakan untuk mendukung pariwisata di daerah tersebut. Dalam hal ini pembangunan dan pemerliharaan berbagai fasilitas dan infrastruktur sangat diperlukan dalam menarik wisatawan dan memebrikan pengalaman yang baik bagi pengunjung yang datang. Infrastruktur wisata mencakup elemen seperti : Akomodasi, Transportasi, objek wisata, fasilitas rekreasi, fasilitas belanja, infratruktur komunikasi dan fasilitas keamanan dan kesehatan. Dengan terpenuhinya elemen tersebut tentu bisa meningkatkan wisatawan.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa di beberapa tempat wisata yang ada masih banyak dan juga masih kurang dalam infrastruktur penunjang di tempat wisata tersebut. Di beberapa titik tempat wisata di benteng moraya terdapat genangan air di jalan masuk tempat tersebut yang mana itu membahayakan wisatwan yang berada ataupun ingin berkunjung ke tempat tersebut dan akomodasi seperti angkutan umum serta penginapan yang masih kurang untuk lingkungan wisata tersebut.

Hal ini juga didukung oleh beberapa informan yang telah dilakukan wawancara kepada beberapa pengunjung yang berada di lingkungan wisata tersebut.

2. Promosi dan Pemasaran Pariwisata

Menurut Lupiyoadi, 2006, Promosi adalah salah satu variable dalam pemasaran yang sangat penting dilaksanakan oleh perusahaan dalam memasarkan produk/ jasa. Kegiatan promosi bukan berfungsi sebagai alat komunikasi antara pemberi jasa atau produk kepada konsumen melainkan sebagai alat dalam mempengaruhi konsumenn dalam kegiatan pembelian atau penggunaan jasa sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya [10].

Dalam hal pariwisata promosi biasa dilakukan oleh pemerintah tetapi bisa juga masyarakat melakukan promosi pariwisata dengan sosial media. Pemerintah Kabupaten minahasa melakukan pemasaran ataupun promosi dalam memajukan pariwisata di daerah tersebut dengan melakukan beberapa hal seperti :

- a) Pemasaran melalui Media sosial: pemerintah kabupaten Minahasa mengunakan media sosial seperti Facebook, Instagram, twiter dan YouTube dalam mempromosikan destinasi wisata
- b) Pembuatan Situs Web Pariwisata: dalam mengembangkan pariwisata perlu didukung di bagian IPTEK. Pemerintah Minahasa membangun situs resmi yang berisikan informasi lengkap tentang destinasi wisata [11].

Berdasarkan hasil yang dikumpulkn peneliti dari hasil wawancara dari beberapa narasumber bahwasannya pemerintah masih belum maksimal dalam melakukan promosi baik di sosial media dan juga di acara tertentu. Untuk web resmi tentang pariwisata pemerintah belum mempunyai web yang benar benar memadai dan langsung dikelolala oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Minahaasa. Website ini sangat berguna dalam memberikan pelayanan kepada para pengunjung, dikarenakan website itu bisa berisi tentang info destinasi wisata di minahasa dan juga akomodasi yang ada di minahasa.

3. Pengelolaan Destinasi Pariwisata

Menurut (Poerwadarminta., 2006) Pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijakan dan tujuan organisasi atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan [12].

Dalam pengelolaan destinasi pariwisata yang dilakukan Dinas Pariwisata Kabupaten Minahasa telah merencanakan beberapa program untuk memajukan pariwisata yang ada, terdiri dari 6 Program yaitu : (a). Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (b) Program Pengembangan Kebudayaan (c) Program Pengembangan Kesenian Tradisional (d). Program peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata (e) Program Pemasaran Pariwisata (f) Program Pengembangan Sumber Daya pariwisata dan ekonomi kreatif.

Dari hasil penelitian yang didapatkan bahwasannya kinerja pemerintah dalam melakukan pengelolaan destinasi wisata dan masih banyak program kerja yang belum terpenuhi secara persentasi yang telah dilakukan peneliti melalui wawancara kepada masyarakat. Dalam hal pengembangan dan pengelolaan di bidang kesenian serta peningkatan daya tarik pariwisata belum terpenuhi, bisa dilihat dari infrastruktur yang tidak dirawat dan sudah mengalami kerusakan.

4. Pengembangan Sumber Daya Manusia

Menurut Saydam Pengembangan SDM, merupakan kegiatan yang harus dilaksakana organisasi agar pengetahuan, kemampuan dan keterampilan mereka sesuai dengan tuntutan pekerjaan yang mereka lakukan [13].

Dalam konteksnya pengembangan sumber daya manusia harus ditingkatkan baik dari kualitas kerja dan juga profesionalisme para pelayan publik di lingkungan wisata, ada beberapa upaya yang dapat dilakukan dalam melakukan pengembangan sumber daya manusia sebagai berikut :

- a) Pelatihan dan pendidikan : melakukan program kepelatihan dan pendidikan yang dilakukan dan ditujukan untuk para pengelola dan pekerja pariwisata, seperti pemandu wisata, pelayanan pelanggan ,dll.
- b) Program Magang dan Praktek Kerja : mengadakan program magang dan praktek kerja bagi mahasiwa terlebih lulusan baru dari perguruan tinggi yang ingin mendapatkan pengalaman langsung dalam bidang pariwisata.
- c) Pemberian sertifikasi dan lisensi : mendorong minat para masyarakat dan mahasiswa bisa menggunakan pemberian lisensi kepada tenaga kerja yang ingin ataupun telah memenuhi syarat dengan persyaratan tertentu. Misalnya, lisensi sertifikat pemandu wisata ataupun keahlian lainnya.
- d) Kolaborasi dengan perguruan Tinggi dan Institusi pendidikan : mengadakan beberapa kegiatan dan mengajak perguruan tinggi untuk melakukan kolaborasi dapat memberikan keuntungan di kedua belahpihak yang mana memperkuat hubungan antara dunia pendidikan dan juga dunia industri.
- e) Mendorong inovasi dan kretivitas : meningktakna budaya inovasi dan kretivitas di industri ini sangat baik terlebih mendorog ide-ide baru dengan pengembangan produk baru. Ini daat dilakukan dengan program dukungan strat-up dan kolaborasi dengan sektor teknologi dan industri kreatif.

Dalam pengembangan sumber daya manusia yang ada bisa dilihat bahwasannya belum ada orang yang layak ataupun belum adanya kepelatihan langsung dari pemerintah setempat kepada baik pedagang dan juga kepada masyarakat lingkungan sekitar yang menjadi pemandu wisata di Benteng moraya yang mana diketahui ada artefak sejarah yang masih ada di Benteng moraya.

Bahwasannya pemandu wisata ini sangat penting mengingat adanya peninggalan yang perlu diberikan penjelasannya kepada para pengunjung ataupun wisatawan.

Dari hasil wawancara yang didapat bahwasannya untuk SDM yang ada memang sangat kurang dan juga dari pemerintah sendiri tidak ada melakukan kegiatan pelatihan dalam rangka peningkatan UMKM sekitar seperti memberikan pembekalan kepada para pedagang sekitar tempat wisata di daerah tersebut.

Dari hasil penelitian yang dilakukan didapatkan bahwa pemerintah Minahasa sendiri belum melakukan tindakan dalam melakukan pengembangan sumber daya manusia yang ada di masyarakat sekitar dan hal tersebut berdampak pada pedagang yang tidak ada menjual souvenir asli masyarakat minahasa dan juga masih minimnya inovasi yang baru untuk meningkatkan pendapatn ekonomi masyarakat sekitar.

5. Pemantuan dan Pengelolaan dampak Pariwisata

Dalam melakukan pemantauan dan pengelolaan bisa dilkakukan tetapi melihat beberapa aspek seperti dampak lingkungan, kualitas lingkungan, edukasi dan kesadaran masyarakat serta perizinan dan pengawasan. Di tempat wisata di Tondano Barat terkhusus di Benteng Moraya banyak pedagang yang bisa dikatakan tidak terdata dan tidak ada izin dari pemerintah, pemantauan kepada pedagang sekiatar wisata itu sangat perlu, terlebih para pedagang yang secara langsung berinteraksi kepada wisatwan dan tentunya harus memberikan pelayanan yang sebaik mungkin.

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa pemerintah sangat jarang melakukan pemantauan ataupun melakukan pengelolaan terhadap wisata yang memang perlu untuk dikelola dan juga, wisata-wisata yang berpotensi menjadi wisata yang baru. Tetapi belum ada pergerakan dari pemerintah tentang bagaimana wisata tersebut dikelola. Hal ini juga di perkuat dengan penelitian Abdul Dilapanga, Jeane Langkai, Nikita Rawung yang mengemukakan bahwa, Dinas Pariwisata Kabupaten Minahasa: (1) belum melakukan analisis tentang kekuatan-kekuatan potensi destinasi pariwisata. (2) belum melakukan analisis tentang kelemahan-kelemahan dari destinasi pariwisata. (3) belum melakukan analisis tentang peluang-peluang destinasi pariwisata. (4) belum melakukan analisis tentang ancaman-ancaman potensi destinasi pariwisata untuk itu disarankan agar Dinas Pariwisata Kabupaten Minahasa di Kabupaten Minahasa mengembangkan potensi destinasi pariwisata bersama para ilmuwan dalam bidang manajemen strategi [4].

3.2 Faktor Pendorong dan Penghambat dalam Memajukan Pariwisata di Tondano Barat

1. Faktor pendukung pemerintah dalam memajukan pariwisata di Tondano Barat

Pertama, kebijakan dukungan dan regulasi yang ramah pariwisata. Pemerintah Kabupaten Minahasa mengeluarkan beberapa kebijakan seperti peraturan Bupati Minahasa Nomor 9 Tahun 2022 tentang pedoman penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Di Kabupaten Minahasa Tahun anggaran 2022 tercantum bahwasannya belanja daerah telah dianggarkan untuk sektor pariwisata berupa pembangunan, pemeliharaan serta peningktana sarana dan prasarana.

Kedua, Kerjasama dengan Swastadan Komunitas Lokal. Dengan melibatkan beberapa komunitas lokal seperti Komunitas Manguni sangat bepenagruh dalam pendukung serta pengembangan pariwisata yang ada dengan menciptakan kemitraan dan keuntungan yang berkelanjutan, yang mana ini sesuai dengan penelitian Jeildy Sumual, Abdul Dilapanga, Joubert Dame mengemukakan bahwa, melaksanakan tugas pokok dan fungsinya lebih baik dengan memperhatikan kualitas hasil kerja, kuantitas hasil kerja, kuantitas hasil kerja memperhatikan waktu dalam melaksanakan pekerjaan dan memperhatikan kerjasama dalam organisasi dalam mengembangkan pariwisata kabupaten minahasa selatan [14]. Ketiga, Pengembangan kawasan pariwisata Terintergrasi. Dengan adanya bebrapa sarana penunjang seperti kantor polisi di wilayah Tondano Barat, RSUD Sam Ratulangi, dan Pasar Tondano yang ada di jarak dekat dapat meningkatkan kenyamanan serta keamanan kepada pengunjung yang berada di objek wisata

2. Faktor Penghambat Pemerintah dalam memajukan pariwisata di Tondano Barat

Pertama, Faktor penghamabat pemerintah dalam memajukan parwisata yang ada di Tondano barat adalah kurangnya sumber daya manusia yang terlatih serta yang berkompeten baik di bidang sejarah serta budaya yang ada di sekitar wilayah minahasa, serta kurangnya tanaga kerja yang kurang terampil dapat memperngaruhi kualitas layanan dan pengalaman wisatwan.

Kedua, Kurangnya disersifikasi produk dan aktivitas, terlalu tergantung pada hanya satu objek wisata seperti Benteng Moraya dapat mengakibatkan destinasi itu rentan terhadap perubahan dan mengakibatkan turunnya angka pengunjung ke objek tersebut dan juga ke wilayah tersebut.

Ketiga, Dana pemeliharaan yang belum dipegang langsung oleh wilayah provonsi. Sebagai wilayah yang baru melakukan pemekaran ada beberapa hal yang masih belum dipegang secara otonom oleh pemerintah daerah seperti hal untuk pemeliharaan budaya dan sejarah yang masih satu dengan wilayah provinsi gorontalo yang mengakibatkan lamanya dana yang turun untuk penagangan pemeliharaan objek wisata

Mengenai faktor pendorong dan juga penghambat terhadap kemajuan pariwisata di Tondano Barat, bisa dilihat dengan menggunakan

teori SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threat). Masih kurangnya fasilitas pendukung dalam menunjang daya tarik wisata adalah masalah dalam peningkatan wisatawan yang berkunjung ke tempat tersebut untuk berwisata [15].

Pengembangan Pariwisata yang ada di Kecamatan Tondano Barat merupakan program yang sudah di buat oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Minahas, tetapi dalam hal pelaksanaan di lapangan yang seperti dilihat dari hasil beberapa wawancara memang masih sangat kurang dalam memajukan pariwisata yang ada.

Hal ini bisa kita lihat dari faktor pendorong dan juga penghambat yang didapatkan bahwasannya yang menjadi penghambat dalam memajukan pariwisata itu terkendala di bagian SDM yang kurang, yang paham betul tentang harus dibawa kemana pariwisata di Tondano Barat ini. Begitu juga dengan faktor keuangan yang masih bisa dibilang belum dikelola langsung oleh dinas pemerintah kabupaten setempat yang mana ini merupakan faktor yang sangat mempengaruhi kinerja dalam pengembangan pariwisata di Kecamatan ini.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Peran pemerintah dalam memajukan pariwisata
 - a. Infrastruktur wisata
Dari infrastruktur yang ada, tugas pemerintah belum maksimal dalam membangun serta mengadakan infrastruktur yang memadai serta infrastruktur pendorong.
 - b. Promosi dan pemasaran pariwisata
Pemerintah Dinas Pariwisata beserta pemerintah Kabupaten Minahasa, dinilai masih kurang dalam melakukan promosi tentang pariwisata yang ada di Minahasa, dilihat dari kegiatan-kegiatan yang di selenggarakan oleh pemerintah Kabupaten yang sangat jarang.
 - c. Pengelolaan destinasi pariwisata
Dalam pengelolaan yang dilakukan pemerintah masih kurang terlihat, ada banyak infrastruktur wisata yang sudah mulai mengalami kerusakan tetapi hanya dibiarkan begitu saja dan belum ada perbaikan dari pemerintah
 - d. Pengembangan sumber daya manusia
Pemerintah bisa dikatakan tidak melakukan pengembangan terhadap sumber daya manusia, yang bisa dilihat tidak adanya pelatihan langsung oleh dinas pariwisata kepada masyarakat. Pemerintah juga tidak ada melakukan kerja sama kepada institusi atau perguruan sekitar untuk melakukan kolaborasi tentang pengembangan pariwisata yang ada di Tondano Barat.

- e. Pemantauan dan dampak pengelolaan pariwisata

Dalam hal pemantauan pemerintah sendiri belum bisa mengembangkan wisata yang, jika dikelola dengan benar pasti mengundang wisatawan untuk berkunjung dan pastinya berdampak untuk masyarakat sekitar

2. Faktor penghambat dan pendorong dalam memajukan pariwisata
 - a. Faktor pendukung pemerintah dalam memajukan pariwisata di Tondano Barat
Dalam hal faktor yang mendukung pemerintah dalam memajukan pariwisata yang ada di Tondano Barat ialah dari segi kebijakan yang dikeluarkan pemerintah serta dorongan dari beberapa komunitas atau organisasi budaya setempat yang menjaga nilai-nilai budaya atau peninggalan-peninggalan yang masih ada sampai sekarang.
 - b. Faktor Penghambat Pemerintah dalam memajukan pariwisata di Tondano Barat
Kurangnya SDM yang cukup membuat pemerintah daerah setempat mengalami kendala dalam melakukan pengembangan terhadap pariwisata yang ada serta keuangan yang belum diatur langsung oleh pemerintah daerah setempat dalam hal penjagaan barang-barang peninggalan yang ada membuat terhambatnya peran atau kinerja pemerintah dalam melakukan pengembangan pariwisata di Tondano Barat

Referensi

- [1] Spillane, *Pengertian Pariwisata*. Bandung: Angkasa, 1987.
- [2] *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan*. 2009.
- [3] M. S. K. Marthinus, "Implementasi Peraturan Daerah Sulawesi Utara No.1 Tahun 2014 Pasal 55 Ayat 1 mengenai Kawasan Pariwisata Alam (Studi Kasus pada Bantaran Danau Tondano)," *Administro*, vol. 3, no. 1, pp. 35–41, 2021, [Online]. Available: <http://ejurnal-mapalus-unima.ac.id/index.php/administro/article/view/2053/927>
- [4] N. R. A Dilapanga, J Langkai, "Strategi Pemerintahan dalam Pengembangan Potensi Destinasi Pariwisata di Kabupaten Minahasa," *J. Adm. J. Kaji. Kebijak. dan Ilmu Adm. Negara*, vol. 1, no. 2, pp. 23–27, 2019.
- [5] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- [6] L. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cetakan ke. Bandung: PT.

- Remaja Rosdakarya Offset, 2017.
- [7] A. M. and S. J. . Miles, M. B., Huberman, *Qualitative Data Analysis*, Fourth. SAGE Publication, 2018.
- [8] Y. D. TAHIR, B. KIYAI, and S. DENGGO, “STRATEGI PROMOSI PARIWISATA BUNGA DI KOTA TOMOHON,” *Adm. Publik*, vol. VII, no. 102, pp. 1–78, 2021, [Online]. Available: <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/download/33308/31503>
- [9] W. H. Hudson, *Infrastructure Management : Integrating Desain, Construction, Maintenance, Rehabilitation, and Renovation*. New York: McGraw-Hill, 1997.
- [10] Lupiyoadi, *Manajemen Pemasaran Jasa*, Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat, 2006.
- [11] J. K. A. L. T. R. K. Lontoh, “PEMANFAATAN MEDIA SOSIAL SEBAGAI STRATEGI PROMOSI BAGI PENGEMBANGAN PEMASARAN WISATA DANAU LINOW DI KOTA TOMOHON,” *EMBA*, vol. 8, no. 4, pp. 11–20, 2020, [Online]. Available: <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emb a/article/view/30435>
- [12] W. S. Poerwadarminta., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2006.
- [13] G. Saydam, *Manajemen Sumber Daya Manusia (Human Resource Management) : Suatu Pendekatan Mikro*. Jakarta: Penerbit Dijambatan, 2011.
- [14] J. D. J Sumual, A Dilapanga, “Implementasi Kebijakan Tunjangan Kinerja Pegawai di Dinas Pariwisata Kabupaten Minahasa Utara,” *J. Adm. J. Kaji. Kebijak. dan Ilmu Adm. Negara*, vol. 2, no. 2, pp. 13–20, 2020.
- [15] S. P. Siagian, *Manajemen Strategik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004.



© 2023 by the authors. Licensee Administro Journal

This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).